

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan negara-negara Visegrad terhadap kebijakan *EU Relocation Scheme* pada krisis pengungsi Eropa tahun 2015 tidak semata-mata merupakan tindakan politik atau respons terhadap kepentingan material. Melainkan merefleksikan upaya dan strategi negara dalam menjaga keamanan ontologis. Melalui pendekatan teori keamanan ontologis, penelitian ini menemukan bahwa sikap penolakan Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia berakar pada kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas identitas nasional, keberlanjutan narasi historis, serta struktur sosial yang relatif homogen secara etnis dan kultural. Data demografis yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara Visegrad memiliki tingkat homogenitas etnis yang tinggi. Komposisi demografis ini membedakan negara-negara Visegrad secara kontras dari negara-negara Eropa Barat yang memiliki tingkat keragaman etnis dan agama yang jauh lebih tinggi akibat sejarah kolonialisme dan imigrasi jangka panjang. Dalam hal ini, homogenitas etno-religius dipersepsikan sebagai sumber kohesi sosial dan rasa aman negara-negara Visegrad. Penolakan tersebut merepresentasikan strategi protektif melalui konstruksi sosial untuk menjaga keberlanjutan identitas dan stabilitas ontologis di tengah tekanan globalisasi dan nilai multikulturalisme. Dari sisi hubungan dengan Uni Eropa, sikap ini memicu ketegangan politik yang signifikan

dan mengguncang prinsip solidaritas Eropa, karena negara-negara Visegrad secara konsisten menempatkan kedaulatan dan identitas nasional di atas komitmen kolektif supranasional. Kegagalan implementasi kebijakan relokasi selanjutnya menunjukkan keterbatasan otoritas hukum Uni Eropa dalam memaksakan kepatuhan negara anggota, yang berdampak pada pergeseran arah kebijakan migrasi menuju pendekatan yang lebih fleksibel melalui *New Pact on Migration and Asylum* 2020.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat kohesi politik dan solidaritas di dalam Uni Eropa. Pertama, Uni Eropa perlu mengembangkan pendekatan kebijakan migrasi yang lebih sensitif terhadap identitas nasional dan konteks historis negara anggotanya. Pendekatan yang terlalu seragam seperti skema relokasi wajib 2015 justru menimbulkan resistensi antar anggota. Oleh karena itu, kebijakan migrasi yang tidak hanya berbasis distribusi kuota, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan sosial, ekonomi, dan nilai kultural tiap negara anggota. Selain itu, penting bagi Uni Eropa untuk mengedepankan diskusi identitas yang lebih inklusif, terutama dengan negara-negara Eropa Tengah guna meredam ketegangan antara narasi solidaritas dan kedaulatan. Uni Eropa perlu mengakui bahwa integrasi yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada hukum dan ekonomi, tetapi juga pada perdamaian identitas dan rasa aman eksistensial negara anggota.

Selanjutnya bagi negara-negara Visegrad, diperlukan refleksi terhadap bagaimana narasi nasionalisme dan homogenitas kultural mereka dapat

dikembangkan tanpa menutup ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan universal. Politik berbasis ketakutan terhadap “yang lain” mungkin memberi stabilitas jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan isolasi dan menghancurkan legitimasi moral di mata komunitas internasional. Dengan demikian, diperlukan pendekatan keamanan ontologis yang lebih terbuka di mana identitas nasional tidak hanya dipertahankan melalui pengecualian, tetapi diperkuat melalui interaksi dan adaptasi terhadap realitas global. Terakhir, bagi penelitian akademik selanjutnya, perlu dilakukan studi komparatif yang menelaah dinamika keamanan ontologis di kawasan lain atau pada kebijakan migrasi pasca-2020, untuk memperkaya pemahaman tentang hubungan antara identitas, keamanan, dan kebijakan supranasional di era kontemporer.